

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP,  
Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak  
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
(PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DI  
WILAYAH BATAM SELATAN)**

**One Yantri**

Fakultas Ekonomi Universitas Batam

Email : one.yantri@univbatam.ac.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah para pegawai pajak (fiskus) di KPP Pratama wilayah Batam Selatan. Jumlah pegawai pajak yang menjadi sampel penelitian ini adalah 57 pegawai pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Batam Selatan. Metode penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sensus, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian uji t hitung Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar 3.060 dengan nilai signifikan 0.003 dimana lebih kecil dari 0,05 maka kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian uji t hitung pemeriksaan pajak sebesar 7.945 dengan nilai signifikan 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05 maka Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Sedangkan hasil penelitian uji t hitung penagihan pajak sebesar 2.314 dengan nilai signifikan 0.025 dimana lebih kecil dari 0,05 maka Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai F hitung 22,995 dengan nilai signifikansi (sig) = 0.000. Karena nilai  $0.000 < 0.05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dengan  $H_a$  diterima, maka model regresi yang diperoleh adalah signifikan atau dapat dikatakan Pengaruh Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak berpengaruh secara signifikan Terhadap Penerimaan Pajak. Dan berdasarkan hasil pengujian koefisien Determinasi ( $R^2$ ), diketahui bahwa nilai  $R^2$  adalah sebesar 0.566. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dipengaruhi Kewajiban Kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak sebesar 0.566 (56.6%) sedangkan sisanya sebesar 43.4% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan penerimaan pajak

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of NPWP ownership obligations, tax audits, and tax collection on tax revenues. Respondents in this study were tax officials (tax authorities) at the Primary Tax Service Office in the South Batam area. The number of tax employees who became the sample of this study were 57 tax employees from the Primary Tax Service Office in the South Batam area. The sampling method used in this study is the census, while the data processing method used is multiple linear regression analysis.*

*The results of the t-test study for NPWP Ownership Obligations of 3,060 with a significant value of 0.003 which is smaller than 0.05, then the NPWP ownership obligation has a significant positive effect on tax revenue. The results of the t-test of tax audits are 7,945 with a significant value of 0.000 which is smaller than 0.05, the Tax Audit has a significant positive effect on tax revenue. While the results of the t-test test for tax collection are 2,314 with a significant value of 0.025, which is smaller than 0.05, so tax collection has a significant positive effect on tax revenue. Based on the results of the F test, the calculated F value is 22,995 with a significance value (sig) = 0.000. Because the value is  $0.000 < 0.05$ , thus  $H_0$  is rejected with  $H_a$  accepted, then the regression model obtained is significant or it can be said that the effect of NPWP ownership obligations, tax audit, and tax collection has a significant effect on tax revenue. And based on the test results of the coefficient of determination ( $R^2$ ), it is known that the value of  $R^2$  is 0.566. From this value, it can be seen that tax revenue is influenced by NPWP Ownership Obligations, tax audits, and tax collection by 0.566 (56.6%) while the remaining 43.4% is influenced by other factors not examined in this study.*

*Keywords: NPWP ownership obligation, tax audit, tax collection and tax revenue*

## **PENDAHULUAN**

Sebagai negara yang berkembang Indonesia memiliki berbagai potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Namun pada kenyataannya Indonesia tidak dapat memanfaatkan berbagai potensi tersebut. Dilihat dari kenyataannya saat ini hampir semua sektor yang ada di Indonesia mengalami berbagai masalah, salah satunya adalah masalah di sektor ekonomi, untuk mengatasi masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif untuk membantu permasalahan perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri dan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara baik fasilitas sarana dan pra-sarana bagi seluruh masyarakat Indonesia (Listyaningtyas, 2012).

Masalah yang dihadapi negara Indonesia adalah realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target. Untuk mencapai target penerimaan pajak, diperlukan

kesadaran dan kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini yang menjadi tujuan utama dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak di KPP yang masuk dalam kas negara (Tampubolon, 2018).

Penurunan jumlah penerimaan pajak pada tahun 2020 menjadi hal menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian di KPP Pratama Batam Selatan. Dengan demikian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Wilayah Batam Selatan”**.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan?
3. Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan?
4. Apakah kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan?

### **Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan.
3. Untuk mengetahui pengaruh penagihan pajak terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan.
4. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak di Kantor Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan.

### **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. Diharapkan dapat mengimplementasikan ilmu akuntansi, khususnya perpajakan yang telah diperoleh dan dipelajari selama masa perkuliahan dan memberikan pemahaman lebih terhadap materi yang didapat.
- b. Untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar sarjana ekonomi program studi akuntansi pada Universitas Batam.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi peneliti sangat bermanfaat untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah dan sistematis melalui penulisan karya ilmiah dibidang ilmu akuntansi.
- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), untuk memberikan evaluasi dan masukan yang dapat berguna mengenai bagaimana pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak yang telah dilakukan.

## **KERANGKA TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

### **Penerimaan Pajak**

Menurut (Mohammad et al., 2017) bahwa “ Penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat, penerimaan pajak juga merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

### **Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

### **Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa :

“Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

### **Penagihan Pajak**

Dalam Pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

## **KERANGKA KONSEPTUAL**

### **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak**

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Pemberian NPWP dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar. Surat tersebut menginformasikan pemenuhan kewajiban perpajakan setiap wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian petugas Seksi Tata Usaha Perpajakan, kewajiban perpajakan tersebut diisi dan harus dilaksanakan oleh setiap wajib pajak. Pengisian kewajiban perpajakan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, sehingga pelaksanaan atas kewajiban perpajakan oleh setiap wajib pajak dapat mengamankan penerimaan pajak. Semakin banyak yang diisi kewajiban perpajakan oleh petugas secara benar dan tepat maka penerimaan pajak dapat meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sujatmiko (2011:12) menyatakan bahwa kepemilikan NPWP berhubungan positif terhadap penerimaan pajak.

### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagaimana penelitian yang telah dilakukan oleh Sukirman (2011:14) bahwa pemeriksaan pajak secara nominal telah meningkatkan penerimaan pajak.

## **Pengaruh Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak**

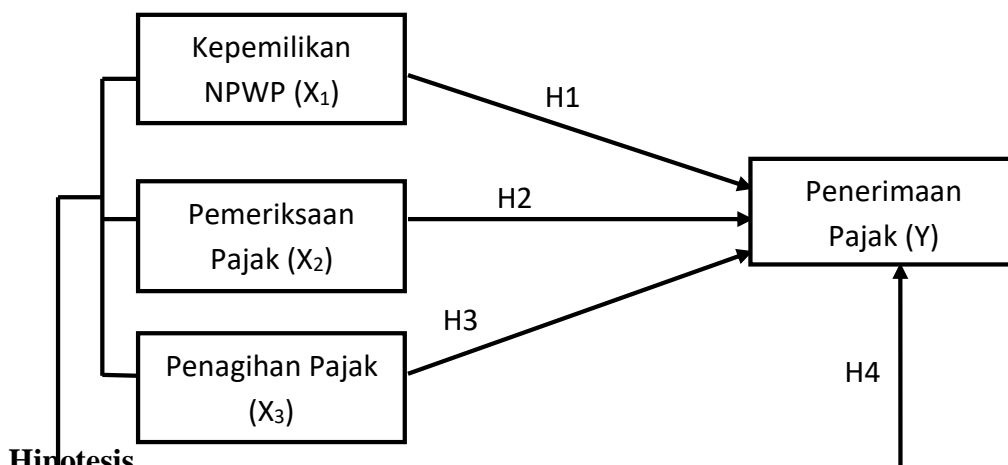
Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Di dalam penelitian yang dilakukan oleh Vegirawati (2011:42) menyatakan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan. Namun peningkatan tersebut belum dicapai secara optimal, hal ini terlihat dari realisasi dibandingkan target penerimaan pajak penghasilan badan, adapun variabel yang paling besar memberikan kontribusi pengaruh terbesar terhadap penerimaan PPh Badan adalah penagihan pajak.

### **Model Penelitian**

Berdasarkan teori-teori tersebut di atas, maka dapat dikemukakan alur pemikiran tentang kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak kedalam model penelitian sebagai berikut :

**Gambar 2.1. Model Penelitian**



### **Hipotesis**

Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat diartikan sebagai suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai data terkumpul dan dapat dibuktikan kebenarannya. Sehubungan dengan identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah di atas maka penulis mengambil hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

- H1 : Kewajiban Kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
- H2 : Pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
- H3 : Penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.
- H4 : Kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak secara simultan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada KPP Pratama Batam Selatan yang bergerak di bidang perpajakan perpajakan yang beralamat di Adhya Building Tower Blok A 1 Komplek Permata Niaga Bukit Indah Sukajadi, Kec.Batam Kota, Kota Batam, Kepulauan Riau.

### **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang mendeskriptifkan atau menggambarkan suatu keadaan atau kejadian dalam bentuk data dan menganalisa suatu data dengan memberikan suatu penjelasan terhadap masalah yang terjadi.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Metode data primer yang digunakan yaitu metode survey dengan teknik kuesioner (*questionnaires*) dan wawancara (*interview*).

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pajak yang ada pada KPP Pratama Wilayah Batam Selatan yang berjumlah 57 orang pegawai dan dalam penelitian ini sampel ditentukan secara sensus, yang artinya menggunakan seluruh populasi sebagai penelitian.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, dan uji hipotesis.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum KPP Pratama Batam Utara**

Pada penelitian ini, peneliti melakukan penelitian pada pegawai pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan sebanyak 57 Orang. Peneliti melakukan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan karena dianggap mampu memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian, terkait dengan fenomena yang telah diangkat pada latarbelakang.

### **Deskripsi Statistik**

**Tabel 4.5**  
**Descriptive Statistics**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation

KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP	57	23	28	25.86	1.517
PEMERIKSAAN PAJAK	57	22	30	26.11	2.335
PENAGIHAN PAJAK	57	21	27	24.37	1.508
PENERIMAAN PAJAK	57	21	30	26.19	2.767
Valid N (listwise)	57				

Berdasarkan table 4.5 diatas dapat diketahui nilai minimum variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar 23 dan nilai maximum 28 . dapat diketahui nilai minimum variable Pemeriksaan Pajak sebesar 22 dan nilai maximum 30, diketahui nilai minimum variable Penagihan Pajak sebesar 21 dan nilai maximum 27, dan diketahui nilai minimum variable Penerimaan Pajak sebesar 21 dan nilai maximum 30.

### Uji Kualitas Data

### Uji Validitas dan Reabilitas

#### Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

Variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1) diukur dengan 6 butir pertanyaan untuk kepetingan pengujian validitas dan reabilitas. Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dapat dilihat pada table 3.4 berikut :

**Tabel 3.4**  
**Hasil Uji Validitas variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)**

No	Nilai r Hitung	nilai r Tabel	Keterangan
1	0.564	0.349	Valid
2	0.517	0.349	Valid
3	0.455	0.349	Valid
4	0.611	0.349	Valid
5	0.556	0.349	Valid
6	0.381	0.349	Valid

Dari tabel 3.4 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r Tabel dengan taraf 0,349 dengan demikian semua soal pernyataan variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dinyatakan valid, karena nilai r hitung > 0.349



**Tabel 3.5**  
**Uji Reabilitas Kewajiban Kepemilikan NPWP**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha <sup>a</sup>	N of Items
.620	6

Dari tabel 3.5 di atas hasil uji reabilitas memiliki nilai cronbach alpha 0,620 yang berarti melebihi batas 0,60. Ini dapat dikatakan bahwa variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP adalah Reliabel atau dapat dipercaya.

**Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)**

Variabel Pemeriksaan Pajak (X2) diukur dengan 6 butir pertanyaan untuk kepetingan pengujian validitas dan reabilitas. Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas variabel Pemeriksaan Pajak dapat dilihat pada table 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Pemeriksaan Pajak (X2)**

No	Nilai r Hitung	nilai r Tabel	Keterangan
1	0.764	0.349	Valid
2	0.601	0.349	Valid
3	0.811	0.349	Valid
4	0.732	0.349	Valid
5	0.598	0.349	Valid
6	0.764	0.349	Valid

Dari tabel 3.6 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r Tabel dengan taraf 0,349. Dengan demikian semua soal pernyataan variabel Pemeriksaan Pajak dinyatakan valid, karena nilai r hitung > 0,349.

**Tabel 3.7**  
**Uji Reabilitas Pemeriksaan Pajak**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.788	6

Dari tabel 3.7 di atas hasil uji reabilitas memiliki nilai cronbach alpha 0,788 yang berarti melebihi batas 0,60. Ini dapat dikatakan bahwa variabel Pemeriksaan Pajak adalah Reliabel atau dapat dipercaya.

**Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Penagihan Pajak (X2)**

Variabel Penagihan Pajak (X3) diukur dengan 6 butir pertanyaan untuk kepetingan pengujian validitas dan reabilitas. Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas variabel Penagihan Pajak dapat dilihat pada table 3.8 berikut :

**Tabel 3.8**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penagihan Pajak (X2)**

No	Nilai r Hitung	nilai r Tabel	Keterangan
1	0.560	0.349	Valid
2	0.493	0.349	Valid
3	0.558	0.349	Valid
4	0.622	0.349	Valid
5	0.747	0.349	Valid
6	0.867	0.349	Valid

Dari tabel 3.8 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r Tabel dengan taraf 0,349. Dengan demikian semua soal pernyataan variabel Penagihan Pajak dinyatakan valid, karena nilai r hitung > 0,349.

**Tabel 3.9**  
**Uji Reabilitas Penagihan Pajak**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.929	6

Dari tabel 3.9 di atas hasil uji reabilitas memiliki nilai cronbach alpha 0,929 yang berarti melebihi batas 0,60. Ini dapat dikatakan bahwa variabel Penagihan Pajak adalah Reliabel atau dapat dipercaya.

### **Uji Validitas dan Reabilitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)**

Variabel Penerimaan Pajak (Y) diukur dengan 6 butir pertanyaan untuk kepentingan pengujian validitas dan reabilitas. Hasil perhitungan korelasi untuk uji validitas variabel Penerimaan Pajak dapat dilihat pada table 3.10 berikut :

**Tabel 3.10**  
**Hasil Uji Validitas Variabel Penerimaan Pajak (Y)**

No	Nilai r Hitung	nilai r Tabel	Keterangan
1	0.871	0.349	Valid
2	0.824	0.349	Valid
3	0.739	0.349	Valid
4	0.750	0.349	Valid
5	0.798	0.349	Valid
6	0.800	0.349	Valid

Dari tabel 3.10 diatas dapat dijelaskan bahwa nilai r Tabel dengan taraf 0,349. Dengan demikian semua soal pernyataan variabel Penerimaan Pajak dinyatakan valid, karena nilai r hitung  $>$  0,349.

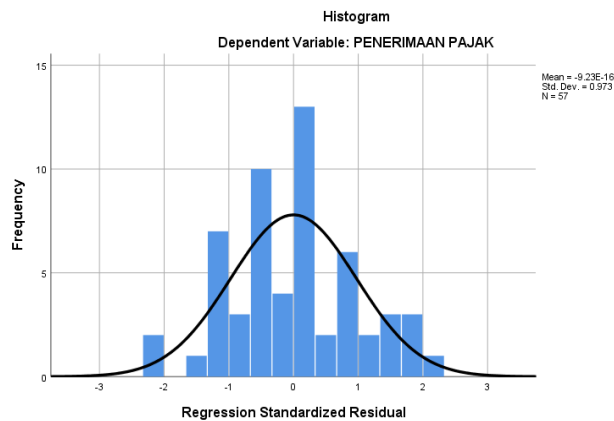
**Tabel 3.11**  
**Uji Reabilitas Penerimaan Pajak**

<b>Reliability Statistics</b>	
Cronbach's Alpha	N of Items
.884	6

Dari tabel 3.11 di atas hasil uji reabilitas memiliki nilai cronbach alpha 0,884 yang berarti melebihi batas 0,60. Ini dapat dikatakan bahwa variabel Penerimaan Pajak adalah Reliabel atau dapat dipercaya.

### **Uji Asumsi Klasik**

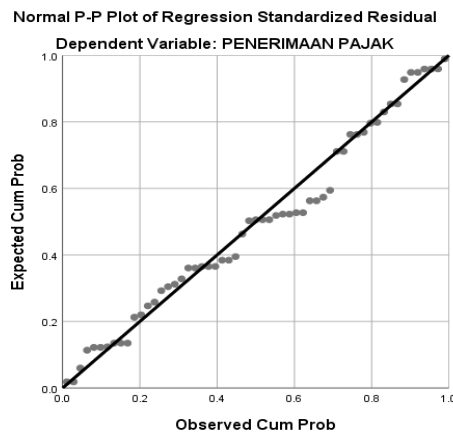
## Uji Normalitas



**Gambar 4.1**

### Hasil Uji Normalitas Dalam Histogram

Berdasarkan gambar 4.1 di atas, hasil uji normalitas dalam histogram residual menunjukkan bahwa data distribusi normal karena grafik membentuk lonceng yang merupakan syarat untuk dapat dilakukan uji regresi. Atau bisa juga dilihat dari jika penyebaran data mengikuti garis diagonal pada grafik p-plot sebagai berikut :



**Gambar 4.2**

### Hasil Uji Normalitas Dalam P-plot

Berdasarkan gambar 4.2 diatas diketahui bahwa pada diagram normalitas terlihat titik – titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Penerimaan Pajak berdasarkan masukan semua variabel bebas.

### Uji Multikolinieritas

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

Model		Coefficients <sup>a</sup>	
		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP	.771	1.297
	PEMERIKSAAN PAJAK	.553	1.808
	PENAGIHAN PAJAK	.667	1.500

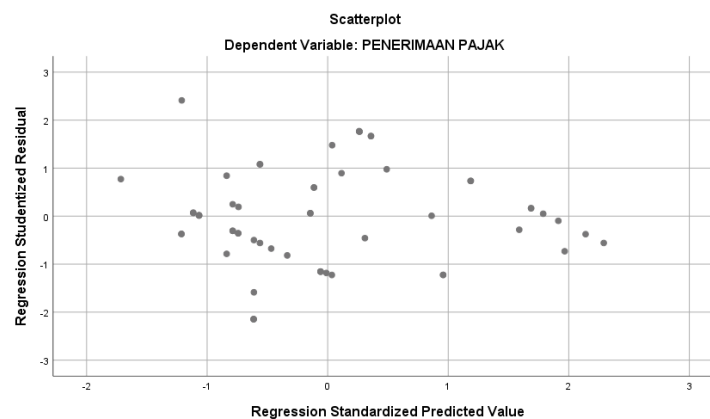
a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Dari Tabel 4.6 di atas dapat diketahui bahwa VIF dari Kewajiban Kepemilikan NPWP sebesar 1.297, untuk Pemeriksaan Pajak 1.808 dan Penagihan Pajak 1.500. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat variabel yang memiliki multikolinieritas dikarenakan VIF tidak ada melebihi dari nilai batas toleransi yang ditentukan (tidak melebihi 4 atau 5). Multikolinieritas artinya terdapat kolerasi yang besar diantara variabel bebas.

### Uji Heterokedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas pada suatu model dapat dilihat dari pola gambar *Scatterplot* model tersebut. Tidak terdapat heterokedastisitas jika :

1. Penyebaran titik-titik data sebaiknya tidak berpola.
2. Titik-titik data menyebar di atas dan di bawah dan sekitar angka 0.
3. Titik-titik data tidak mengumpul hanya di atas atau di bawah saja.



**Gambar 4.3 : Hasil Uji Heterokedastisitas**

Berdasarkan gambar 4.3 di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terbebas dari asumsi klasik heterokedastisitas dikarenakan titik-titik data tidak berpola dan menyebar di atas dan di bawah atau sekitar angka 0.

### Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara suatu periode t dengan periode sebelumnya (t -1). Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi adalah untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya.

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Koefisieni Determinasi**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	.752 <sup>a</sup>	.566	.541	1.875	.566	1.852
a. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK, KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK						
b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK						

Kriteria pengambilan keputusan pengujian autokorelasi adalah sebagai berikut:

- Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif.
- Angka D-W diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.
- Angka D-W diatas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Dari hasil tabel 4.9 tersebut dapat dilihat Durbin-watson menunjukkan nilai sebesar 1.852 dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa DW berada diantara -2 sampai +2 berarti tidak ada autokorelasi.

### Uji Hipotesis

Analisis linier berganda yaitu untuk menganalisa seberapa besar pengaruh antara beberapa variabel bebas (*Independent variable*). Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan :

- Y = Variabel dependen ( Penerimaan Pajak )
- a = Konstanta
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Variabel independent ( Kewajiban Kepemilikan NPWP )
- X2 = Variabel Independent ( Pemeriksaan Pajak )
- X3 = Variabel Independant ( Penagihan Pajak)
- e = Error / Variabel yang tidak diajukan dalam penelitian

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.632	5.314		4.259	.000
	KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP	.576	.188	.316	3.060	.003
	PEMERIKSAAN PAJAK	1.146	.144	.967	7.945	.000
	PENAGIHAN PAJAK	.471	.204	.257	2.314	.025

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Sumber : Data SPSS yang diolah 2021

Berdasarkan hasil pengujian parameter individu yang di sajikan dalam tabel di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model regresi sebagai berikut :

$$Y = 22.632 + 0.576 X_1 + 1.146 X_2 + 0.471 X_3 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, maka dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) untuk persamaan regresi sebesar 22.632 dengan parameter positif. Hal ini berarti jika Kewajiban Kepemilikan NPWP (X<sub>1</sub>), Pemeriksaan Pajak (X<sub>2</sub>) Penagihan Pajak (X<sub>3</sub>) sama dengan nol, maka nilai Penerimaan Pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan sebesar 22.632.
2. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Kewajiban Kepemilikan NPWP terhadap Penerimaan Pajak. Koefisien b<sub>1</sub>= 0,576 dengan nilai signifikan 0,003 < 0,05 yang berarti menunjukkan peningkatan 1 satuan Kewajiban Kepemilikan NPWP akan meningkatkan Penerimaan Pajak sebesar 0,576 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
3. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Koefisien b<sub>2</sub>= 1,146 dengan nilai signifikan 0,000 < 0,05 yang berarti menunjukkan peningkatan 1 satuan Pemeriksaan Pajak sebesar 1,103 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.
4. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak. Koefisien b<sub>3</sub>= 0.471 dengan nilai signifikan 0,025 < 0,05 yang berarti menunjukkan peningkatan 1 satuan Pemeriksaan Pajak sebesar 0.471 dengan asumsi variabel-variabel bebas lainnya konstan.

**Uji Signifikan Parsial (Uji Statistik t)**

Uji *t-test* digunakan untuk menguji apakah variabel independent berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*). Berikut hasil uji t :

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Statistik t**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	22.632	5.314		4.259	.000
	KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP	.576	.188	.316	3.060	.003
	PEMERIKSAAN PAJAK	1.146	.144	.967	7.945	.000
	PENAGIHAN PAJAK	.471	.204	.257	2.314	.025

a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK

Berdasarkan hasil statistic pada Tabel 4.9 di atas dapat di jelaskan bahwa sebagai berikut :

1. Kewajiban Kepemilikan NPWP

Berdasarkan tabel diatas didapati nilai t hitung sebesar 3.060 dengan nilai signifikan 0.003 dimana lebih kecil dari 0,05 maka kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak sehingga H1 diterima.

2. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan tabel diatas didapati nilai t hitung sebesar 7.945 dengan nilai signifikan 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05 maka Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak sehingga H2 diterima.

3. Berdasarkan tabel diatas didapati nilai t hitung sebesar 2.314 dengan nilai signifikan 0.025 dimana lebih kecil dari 0,05 maka Penagihan Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap penerimaan pajak sehingga H3 diterima.

**Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F)**

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh variabel bebas (*Independent Variable*) terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*) secara bersama-sama. Dapat dilihat pada Tabel 4.10 dibawah ini :



**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji F Test**

ANOVA <sup>a</sup>						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	242.541	3	80.847	22.995	.000 <sup>b</sup>
	Residual	186.336	53	3.516		
	Total	428.877	56			
a. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK						
b. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK, KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK						

Berdasarkan hasil statistik pada Tabel 4.10 di atas dapat disimpulkan bahwa F hitung 22.995 dan signifikansi 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak oleh karena itu H4 yang menyatakan Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak dan signifikan dapat diterima.

#### Uji Koefisien Determinasi ( R<sup>2</sup> )

Analisis ini untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau kontribusi variabel bebas (*Independent Variable*) terhadap variabel terikat (*Dependent Variable*).

**Tabel 4.11**  
**Analisis Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Model Summary <sup>b</sup>						
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change	Durbin-Watson
1	.752 <sup>a</sup>	.566	.541	1.875	.566	1.852
a. Predictors: (Constant), PENAGIHAN PAJAK, KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NPWP, PEMERIKSAAN PAJAK						
b. Dependent Variable: PENERIMAAN PAJAK						

Berdasarkan hasil pengolahan data diketahui bahwa nilai R sebesar 0.752 (75.2%) sedangkan nilai R<sup>2</sup> adalah sebesar 0.566. Dari nilai tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan pajak dipengaruhi Kewajiban Kepemilikan NPWP,

Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak sebesar 0.566 (56.6%) sedangkan sisanya sebesar 43.4% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

Berdasarkan hipotesis yang telah dilakukan maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut :

#### **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP Terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa semakin banyak NPWP yang dimiliki wajib pajak maka Penerimaan Pajak yang di terima akan semakin tinggi hal ini di buktikan secara statistik dengan menggunakan SPSS 25 terdapat pada pengujian secara uji parsial (uji t) pada table 4.11 variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak nilai t hitung sebesar 3.060 dengan nilai signifikan 0.003 dimana lebih kecil dari 0,05. Hal ini menyatakan bahwa kewajiban kepemilikan NPWP memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Kewajiban kepemilikan NPWP yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batam Selatan mengenai prosedur, administrasi, dan pelayanan membuat penerimaan pajak semakin meningkat.

Menurut Waluyo (2011:30), setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak/NPWP, atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga menimbulkan kerugian bagi pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang. Dengan adanya kewajiban memiliki NPWP dan sanksi yg diberikan jika menyalahgunakan NPWP tersebut, maka wajib pajak harus membayar pajak terutangnya dengan demikian dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong (2015), yang menyatakan bahwa Kepemilikan NPWP memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, yang artinya setiap penambahan NPWP akan mempengaruhi penerimaan pajak dan semakin sering dilakukan penagihan pajak akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

#### **Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak dengan menggunakan uji t terdapat nilai t hitung sebesar 7.945 dengan nilai signifikan 0.000 dimana lebih kecil dari 0,05 maka variabel Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Jadi semakin tinggi pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pajak maka penerimaan pajak akan lebih meningkat.

Hal ini berarti bahwa semakin efektif seorang karyawan pemeriksa pajak dalam melakukan setiap tahapan-tahapan pemeriksaan pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 dapat meningkatkan penerimaan negara dalam sektor perpajakan. Peran pemeriksaan sebagai pendongkrak penerimaan pajak mengharuskan adanya pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan pemeriksaan pajak. Pengawasan atau pengendalian intern terhadap pemeriksaan pajak ini diimplementasikan dalam bentuk administrasi dan monitoring terhadap pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak juga bertujuan untuk meredam kecurangan yang dilakukan wajib pajak untuk meminimalkan pajaknya. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak, DJP melakukan pemeriksaan rutin kepada wajib pajak. Apabila telah dilakukan pemeriksaan dengan baik maka akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak negara.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukirman (2011) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajak. Pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan, dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh WP.

### **Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penagihan Pajak dengan menggunakan uji t didapati nilai t hitung sebesar 2.314 dengan nilai signifikan 0.025 dimana lebih kecil dari 0,05 maka variabel Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Jadi semakin tinggi Penagihan yang dilakukan oleh petugas pajak maka penerimaan pajak akan lebih meningkat.

Dengan adanya penagihan pajak, wajib pajak yang tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun serangkaian tindakan yang dilakukan oleh dirjen pajak agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya, yaitu melalui tahapan-tahapan penagihan pajak. Serangkaian tahapan-tahapan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Diharapkan dengan serangkaian tahapan-tahapan tersebut dapat membuat wajib pajak patuh serta tepat waktu dalam membayar kewajiban perpajakannya, sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Simangunsong (2015), yang menyatakan bahwa Penagihan Pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak, yang artinya setiap penambahan NPWP akan mempengaruhi penerimaan pajak dan semakin sering dilakukan penagihan pajak akan berkontribusi terhadap penerimaan pajak.

### **Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Berdasarkan pengujian hipotesis Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak simultan atau bersama-sama terhadap Penerimaan Pajak dengan menggunakan uji F diperoleh nilai hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak secara simultan atau bersama-sama memiliki efek signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

Untuk mengetahui Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak secara simultan atau bersama-sama menggunakan uji F dapat dilihat pada Tabel 4.12, diperoleh nilai F hitung = 22.995 dengan tingkat signifikansi (sig) = 0,000. Karena nilai Signifikan  $0,000 < 0,05$ , dengan demikian  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. maka model regresi yang diperoleh adalah signifikan atau dapat dikatakan Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kuesioner yang di sebarakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan diperoleh bahwa Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai Sig sebesar  $0.003 < 0.05$  yang berarti bahwa semakin tinggi kepemilikan NPWP maka tingkat Penerimaan Pajak yang akan semakin meningkat pula.
2. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kuesioner yang di sebarakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan diperoleh bahwa Pemeriksaan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai Sig sebesar  $0.000 < 0.05$  yang berarti bahwa semakin efektif Pemeriksaan pajak maka tingkat Penerimaan Pajak yang akan semakin meningkat pula.
3. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan kuesioner yang di sebarakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Selatan diperoleh bahwa Penagihan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak dengan hasil pengujian regresi yang menunjukkan nilai Sig sebesar  $0.025 < 0.05$  yang berarti bahwa semakin tinggi penagihan pajak maka tingkat Penerimaan Pajak yang akan semakin meningkat pula.
4. Realisasi penerimaan pajak yang tidak mencapai target selama tahun 2019-2020 pada KPP Pratama Batam Selatan dikarenakan dampak

Pandemi Covid-19 yang menyebabkan wajib pajak mengalami kendala dalam pembayaran pajak, dan target penerimaan pajak yang ditetapkan terlalu tinggi, jumlah SPT yang terealisasi tidak sebanding dengan SPT yang wajib dilaporkan, meningkatnya Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dan wajib pajak yang tidak kooperatif.

### **Saran**

Dari hasil penelitian ini ada beberapa saran yang dapat penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan sosialisasi dan menghimbau wajib pajak tentang pentingnya hak dan kewajiban perpajakan, agar kedepannya wajib pajak diharapkan lebih memahami tentang masalah perpajakan terkhusus tentang kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT tepat waktu dan mengisi SPT dengan data yang sebenarnya sehingga penerimaan pajak bisa diperhitungkan dengan benar.
2. Pemeriksaan pajak yang dilakukan di KPP sudah baik namun perlu ditingkatkan lagi, dengan tahapan, prosedur dan pedoman pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan.
3. Dalam melakukan penagihan pajak agar sesuai prosedur yang berlaku seperti menggunakan surat tagihan pajak (SPT), surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) dan berbagai surat lainnya yang dapat mendukung penagihan pajak.
4. Untuk penelitian selanjutnya agar tidak berfokus kepada variabel kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak saja, tapi juga meneliti variabel lainnya seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak dan lain sebagainya

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Firdaus, 2018. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Wilayah Batam Utara. Skripsi. Batam: Fakultas Ekonomi Universitas Batam.
- Firdayani, Layuk, P. K. A., & Allolayuk, T. (2017). Pengaruh Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, 12(1), 24–38.
- Harjo, D. (2019). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa Dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123-133

- Indrawan, M. G., & Raymond, R. (2020). Pengaruh Norma Subjektif Dan Return Ekspektasian Terhadap Minat Investasi Saham Pada Calon Investor Pada Program Yuk Nabung Saham Di Kota Batam. *Jurnal Akrab Juara*, 5(3), 156-166.
- Indrawan, M. G., & Siregar, D. L. (2021). Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Smartphone Samsung Di Kota Batam. *Jurnal Ekobistek*, 81-87.
- Kastolani, Y., J., O. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Badan Yang Terdaftar Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kota Semarang Tahun 2012-2016). *Skripsi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin. “Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung”, Surabaya, 2012.
- Muhammad, A., & Sunarto. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus Pada KPP Pratama Raba Bima Tahun 2012-2015. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 37–45.
- Muiz, Enong. “Pengaruh Inflasi dan Perkapita terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Provinsi Banten”, *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah*, Vol.1, No.2, November 2012.
- Munari. “Pengaruh *Tax Payer* terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kasus KPP Yogyakarta Satu)”. *Jurnal Eksekutif* Vol.2, No.2, Agustus 2010.
- Odilla, R., F. (2020). Analisis Efektivitas Kewajiban Kepemilikan NPWP sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program EktensifikasiWajib Pajak Di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya*.
- Pamber, S. (2016). Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pekanbaru Tampan). *Jurnal Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Rokan Hulu*.
- Purba, Arifanda. “Analisis Hasil Pemeriksaan Pajak Tahun 2008-2011 untuk Menentukan Pola Profil wajib pajak Badan yang Potensial di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Palmerah”, Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2012.
- Priyatno, Duwi. “Mandiri Belajar Analisis Data dengan SPSS”, Yogyakarta: MediaKom, 2013
- Putra, D. G., & Raymond, R. (2019). PENGARUH DANA PIHAK KETIGA DAN KECUKUPAN MODAL TERHADAP PROFITABILITAS PADA BANK RIAU KEPRI KOTA BATAM. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2).
- Raymond, R. (2018). Peningkatan Kinerja Pemasaran Melalui Pelatihan Perencanaan Bagi Kelompok Usaha Kerajinan Taufan Handrycraft Di Kota Batam. *J-ABDIPAMAS (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 105-110.
- Rumengan, Jemmy, dkk (2020). *Metodologi penelitian*, Aceh: Sefa Bumi Persada

- Ramadani, S. (2018). Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Timur. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Rembangan, E. R., & Mawikere, L. (2016). Analisis Efektivitas Pemeriksaan , Penagihan Dan Penerimaan Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Kotamobagu. *EMBA*, 4(1), 860–867.
- Rahayu, Siti Kurnia. “Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Savira Warlina, Syamsul Bahri Arifin, S.E, M.Ak<sup>2</sup>. (2016). ” Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Penerimaan Pajak ( Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat). *Jurnal Riset Akuntansi & Bisnis* Vol, 16No. 1, ISSN : 1693- 7597.
- Sulistiani, E., Y. (2019). Analisis Fungsi Pemeriksaan Pajak Dalam Upaya Optimalisasi Penerimaan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung Alfabeta, CV.
- Sutrisno, B., Arifati, R., & Andini, R. (2016). Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Surat Paksa, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak. *Journal of Accounting*, 2 (2), 1–20.
- Saragih, W. (2015). Pengaruh Kepemilikan NPWP dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak (Studi Kasus Pada KPP Pratama Majalaya Periode 2011-2015). *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Komputer Indonesia*.
- Sudiyanto, T. (2015). Analisis Pemeriksaan Pajak Terhadap Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 11(4), 37-36.
- Sukirman. “Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak”, Analisis Manajemen, Vol.5, No.1, Juli 2011.
- Sumarsan, Thomas. “Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)”, Indeks, Jakarta, 2010.
- Tampubolon, A., S., Y. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur. *Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UINSU Medan*.
- Tansuria, Billy Ivan. “Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)”, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- UPB, J. I. M. (2017). Pengaruh Likuiditas Dan Solvabilitas Terhadap Profitabilitas Pada PT Indosat Tbk. *JIM UPB (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 5(1), 110-118.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)  
[www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html](http://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html), artikel tersebut diakses tanggal 17 Maret 2021, pada pukul 13:45